

DINAMIKA PARTAI NAHDLATUL ULAMA (NU) PASCA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN FUSI PARTAI TAHUN 1977-1984

Dadang Nur Jaman

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
 Email: dadangnurjaman006@gmail.com

Abstract: Nahdlatul Ulama (NU) is one of the political parties that once existed in Indonesia. This paper aims to describe the dynamics of the Nahdlatul Ulama Party following the implementation of party fusion. This research uses historical research methods consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The data collection technique in this research uses the library study method, consisting of secondary sources from books, scientific articles, and other scholarly writings. This research shows that NU is a political party that was originally a socio-religious organization. NU entered the political arena when it became a pioneer of the Masyumi Party and an honorary member of that party. NU became its own party after leaving Masyumi in 1952. President Suharto issued a party fusion policy in 1973 that required NU to merge with other Islamic parties and become part of the Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU decided to return to its original path as a socio-religious organization in 1984, known as *Khittah* 1926.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Party Fusion, *Khittah* 1926.

Abstrak: Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu partai politik yang pernah eksis di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika Partai Nahdlatul Ulama pasca pemberlakuan fusi partai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka berupa sumber sekunder yang berasal dari buku, artikel ilmiah dan karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa NU merupakan partai politik yang awalnya sebuah organisasi sosial keagamaan. NU terjun ke dunia politik ketika menjadi perintis Partai Masyumi dan menjadi anggota istimewa di Partai tersebut. NU menjadi partai sendiri setelah keluar dari Masyumi pada 1952. Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi partai pada 1973 yang mengharuskan NU bergabung dengan partai Islam lainnya dan melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU memutuskan untuk kembali ke jalan awal sebagai organisasi sosial keagamaan pada 1984 atau yang dikenal sebagai *Khittah* 1926.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Fusi Partai, *Khittah* 1926.

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu partai politik yang pernah eksis di Indonesia pada masa orde lama hingga

pertengahan orde baru. NU pada awal pembentukannya bukanlah sebuah partai politik, melainkan sebuah organisasi sosial keagamaan yang berdiri pada 31

Januari 1926 di Surabaya. NU dibentuk oleh para ulama tradisional sebagai bentuk reaksi dari adanya gerakan pemurnian dan pembaharuan yang dilakukan oleh kelompok modernis seperti Muhammadiyah dan Persis (Nikmah, 2023: 34).

Kiprah NU di bidang politik dimulai ketika NU berstatus sebagai anggota istimewa saat pembentukan Partai Masyumi. Status keanggotaan istimewa didapat NU setelah pembentukan Partai Masyumi melalui Mukhtar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7-8 November 1945, yang dihadiri oleh organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia, termasuk NU ormas yang mengikuti muktamar tersebut dan menjadi perintis terbentuknya Partai Masyumi (Madinier, 2013:66). Masyumi yang terbentuk melalui Mukhtar ini berbeda dengan Masyumi bentukan Jepang yang digunakan sebagai propaganda Jepang terhadap masyarakat Indonesia melalui ulama. Masyumi di masa kemerdekaan ini merupakan partai politik yang dibentuk setelah adanya Maklumat dari Wakil Presiden Moh. Hatta tentang anjuran pembentukan partai politik pada 3 November 1945.

Hubungan NU dengan Partai Masyumi hanya berlangsung selama 7 tahun yang berakhir pada 1952. NU menyatakan untuk keluar dari Masyumi

dan mendirikan partai politik sendiri setelah pelaksanaan Mukhtar NU ke-XIX di Palembang pada 5-6 April 1952. Kondisi politik di Masyumi yang didominasi kelompok modernis semakin meningkat yang seringkali menimbulkan perselisihan antara golongan muda yang mendapat pendidikan Belanda dan golongan NU yang pendidikannya berbasis pesantren (Al-Nahra, 2024: 107). Hal ini mendorong konflik antara Masyumi dan NU yang pada akhirnya pada 31 Juli 1952 NU menyatakan memisahkan diri dari Masyumi. Kebersamaan keduanya sejak kemerdekaan berubah menjadi lawan politik, saat NU mulai mengorganisir diri dan bertransformasi menjadi partai politik pada 30 Agustus 1952 (Fealy, 2003: 98-118). NU menjadi partai politik baru di pentas nasional pada tanggal 24 Juni 1953 dengan pemilihan umum tahun 1955 sebagai agenda pertamanya.

Sistem demokrasi liberal yang berakhir pada 1959 kemudian diganti dengan sistem demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959-1966. Soekarno mengusung sistem demokrasi ini karena sistem demokrasi parlementer sebelumnya dirasa tidak cocok, sebab hanya menimbulkan konflik antar ideologi partai politik. Sistem demokrasi terpimpin mulai berlaku ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli

1959 dan mulai berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara (Bathoro, 2018: 26). Demokrasi terpimpin ini juga menandakan berakhirnya Kabinet Djuanda yang digantikan oleh Kabinet Kerja bentukan Soekarno sebagai pelaksana sistem ketatanegaraan negara Indonesia, dengan slogan yang digagas oleh Soekarno yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis)

NU sebagai partai Islam, bersama PNI sebagai kekuatan Nasionalis terbesar dan PKI sebagai kekuatan Komunis terbesar, turut serta dalam konsep Nasakom tersebut, bersama dengan tujuh partai politik lainnya. Namun, keterlibatan NU dalam koalisi besar yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno tidak berarti NU menerima begitu saja proses Nasakomisasi. Perbedaan ideologis dengan PKI membuat NU bersikap menentang berbagai manuver politik PKI yang merupakan bagian dari Nasakom.

Nasakom bentukan Soekarno bertujuan untuk menyatukan ideologi-ideologi partai politik di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan acap kali mendapatkan pertentangan dari partai-partai tersebut misalnya sering ada pertentangan dari kelompok agamis karena Soekarno mengikutsertakan PKI dalam susunan pemerintahan. Soekarno melakukan penyederhanaan partai politik

pada masa ini, yaitu melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 7/1959 dan Penpres berikutnya No 13/1960 (Mukhsin, 2018: 780). Sistem demokrasi terpimpin dan Nasakom besutan Soekarno hanya bertahan hingga tahun 1967. Soekarno mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat pasca peristiwa G30S, hal tersebut disebabkan karena Soekarno dianggap terlibat pada peristiwa tersebut dan membuat Soekarno lengser kemudian diganti oleh Soeharto pada tahun 1967.

NU ketika memasuki masa orde baru masih dianggap sebagai salah satu partai besar di Indonesia, meskipun terdapat kelemahan yang menjadi ketidakselarasan dengan pemerintahan Soeharto. Sebagai contoh, kurangnya kader NU yang kompeten di bidang militer dan ekonomi. Pemerintahan orde baru menganggap NU hanya sebagai pelengkap saja, hal tersebut karena Orde Baru lebih condong bekerjasama dengan cendekiawan dan para teknokrat. Tokoh-tokoh senior NU awalnya ragu-ragu untuk mendukung pemerintahan Soeharto meskipun pada akhirnya NU tetap mendukung pemerintahan orde baru Soeharto (Chumairoh, 2014: 41-42). Sebagai bentuk dukungannya, NU akan kembali ikut serta dalam pemilu era orde baru yang rencananya akan digelar pada tahun 1968.

Pemilu merupakan inisiatif penting dalam rangka pendemokrasian Orde Baru dan pencarian legitimasi. Partai politik menuntut agar Pemilu secepat mungkin digelar, namun tuntutan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan alasan belum adanya kesiapan mengenai RUU tentang pemilu dan partai politik dan baru terlaksana pada tahun 1971 (Marijan, 1992: 96). Partai politik di era Orde Baru berperan sebagai sarana aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan juga menjadi harapan baru bagi dinamika perpolitikan Indonesia pasca selesainya pemerintahan Soekarno.

Presiden Soeharto satu tahun menjelang penyelenggaraan pemilu melakukan pertemuan dengan para pemimpin partai politik pada februari 1970. Pertemuan tersebut membahas membahas rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah partai. Setelah pertemuan tersebut, pada Maret 1970, terbentuk dua kelompok koalisi di DPR yaitu Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang terdiri dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik; dan Kelompok Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti (Pamungkas, 2009: 119). Pemilu era Soeharto digelar pertama kali pada 5 Juli 1971 yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1969 Tentang Pemilu. Partai politik yang menjadi peserta Pemilu tahun 1971 terjadi pengurangan menjadi 10 partai politik yaitu Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba. NU memperoleh suara sebesar 10.213.650 suara (18,68%).

Merujuk pada Tap MPRS No. XXII tahun 1966 tentang pembaharuan sistem partai politik, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi partai yaitu pengelompokan partai politik berdasarkan tujuan dan program dari partai-partai yang ada. Hasil pemilu 1971 dan posisi ABRI di DPR/MPR mempengaruhi kesuksesan kebijakan penyederhanaan partai politik di rezim orde baru. Proses ini terkait dengan pemilu, karena pemilu menciptakan peta kekuatan politik yang benar-benar baru. Partai Golkar, yang didukung oleh pemerintah, telah keluar sebagai pemenang melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973, yang menyederhanakan kembali jumlah partai politik dengan kebijakan fusi partai (Rizqi, 2016: 207). Dalam hal ini, NU digabungkan dengan partai yang berideologi agama yaitu Parmusi, PSII, dan Perti yang kemudian menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

NU yang sejak tahun 1973 berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1984 memutuskan untuk kembali ke jalan awal pembentukan

Nahdlatul Ulama itu sendiri yaitu menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam AD/ART Nahdlatul Ulama Bab 1 Pasal 3 yang isinya menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial (PBNU, 2022: 50). NU yang telah kembali ke *Khittah* 1926 tersebut memposisikan politik hanya sebagai instrumen mencapai tujuan kemaslahatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, NU secara struktural menerapkan politik kebangsaan, keumatan, kerakyatan, dan etika, bukannya politik praktis yang berfokus pada kekuasaan dengan menghalalkan semua cara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan kepada metode historis yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013: 69). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu pengumpulan literatur-literatur yang berupa data primer dan data sekunder. Data pada penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari sumber-sumber sekunder yang berasal dari buku, artikel ilmiah dan karya tulis ilmiah

lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. NU dibentuk oleh ulama-ulama di Pulau Jawa pada 31 Januari 1926 di Surabaya yang diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri dan ulama-ulama lainnya (Hafid, 2009: 2). NU pada awal berdirinya bukanlah partai politik melainkan sebuah organisasi sosial keagamaan. NU muncul sebagai organisasi Islam merupakan bentuk reaksi dari munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional dan organisasi modernis Islam di Hindia Belanda.

NU mulai terlibat pada ranah politik dimulai ketika pembentukan sebuah badan federasi yang menghimpun organisasi-organisasi Islam di Hindia Belanda yang dikenal sebagai Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang sekaligus menandakan termanifestasinya orientasi organisasi di bidang politik (Anwar, 2020: 359). Kedatangan Jepang membuat keberadaan organisasi-organisasi Islam terganggu dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang melakukan propaganda dengan memecah-belah organisasi-organisasi Islam di Indonesia

yang membuat mereka harus membubarkan diri, seperti yang terjadi pada PSII dan PII serta berakhirnya riwayat MIAI pada 24 Oktober 1943 yang kemudian diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Masyumi dibentuk atas inisiasi organisasi-organisasi Islam di Indonesia, termasuk NU yang juga menjadi perintis. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan Masyumi tersebut dengan harapan bahwa Masyumi dapat membantu mereka dalam perang pasifik, selain itu pemerintah Jepang juga berupaya untuk menyingkirkan PSII dengan pembentukan Masyumi ini karena Jepang menganggap PSII tidak kooperatif terhadap pemerintah kolonial (Miftahudin. dkk, 2021: 10). Masyumi yang diberikan keleluasaan oleh pemerintahan Jepang menjadikan pergerakan umat Islam dalam upaya meraih kemerdekaan semakin gencar dan meluas yang salah satunya melalui jalur organisasi politik.

Nama Masyumi kembali muncul ketika era awal kemerdekaan Indonesia. Masyumi kali ini tidak sama dengan Masyumi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1943. Masyumi yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan ini merupakan partai politik yang dibentuk atas kesepakatan organisasi-organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang salah satunya adalah NU

yang menjadi perintis sekaligus menjadi anggota istimewa Masyumi. Partai Masyumi dibentuk melalui Mukhtamar Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan pada 7-8 November 1945 di Yogyakarta (Noer, 1987: 47). NU yang menjadi salah satu anggota istimewa di tubuh Partai Masyumi mengukuhkan dukungannya melalui Mukhtamar NU di Purwokerto pada 1946 yang kemudian sebagai tindak lanjutnya ulama-ulama di NU menganjurkan agar para anggotanya bergabung ke Masyumi (Al-zahra, 2023: 1). Kiprah NU yang menjadi bagian dari Partai Masyumi dalam bidang politik ditunjukkan dengan aktifnya kader-kader NU yang menempati jabatan-jabatan di Pemerintahan Indonesia pada kurun waktu 1945 hingga 1952.

Hubungan NU dan Masyumi hanya berlangsung kurang lebih 7 tahun saja. NU memutuskan untuk berpisah dengan Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri pada 1952. Adanya perbedaan pandangan antara NU dengan internal Partai Masyumi menjadi salah satu pemicu keputusan NU berpisah dengan Masyumi, seperti tidak didapatkannya jatah Menteri Agama bagi kader NU serta permasalahan pada fungsi Majelis Syuro Partai Masyumi (Mahbub, 2023: 37-38).

NU memutuskan keluar dari Masyumi terjadi karena beberapa faktor, seperti komposisi kepemimpinan Masyumi,

struktur organisasi, dan ketidakefektifan Dewan Syuro yang dianggap hanya sebagai simbol. Masalah lain yang muncul adalah minimnya rasa hormat dan respon terhadap peran kiai serta aspirasi pesantren, yang membuat mereka semakin terpinggirkan dalam dunia politik. Ada pula yang menyatakan bahwa pembagian jatah menteri dianggap tidak adil (Anwar, 2020: 360). Ketidakharmonisan antara kader NU dengan pengurus Partai Masyumi mengakibatkan keduanya memutuskan untuk berpisah.

Pemilu 1955 menjadi kontestasi pertama NU dalam perpolitikan nasional. Keluarnya NU dari Masyumi mengharuskan keduanya bersaing dalam kontestasi Pemilu tahun 1955. NU yang semula dianggap tidak dapat berbuat banyak karena hanya mempunyai persiapan kurang dari tiga tahun, secara mengejutkan NU berhasil menempati posisi ketiga perolehan suara Nasional di bawah PNI dan Masyumi. NU meraih total suara 6.955.141 untuk pemilihan anggota DPR, sedangkan, total perolehan suara yang diraih NU untuk Konstituante sebesar 6.989.333 (Pamungkas., dkk, 2019:142). Selama periode demokrasi liberal yang berakhir pada tahun 1959, kader-kader NU menempati jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan Indonesia, Hal tersebut menunjukkan

keberhasilan NU menjadi sebuah partai politik.

NU selama era demokrasi liberal yang berlangsung pada kurun waktu 1950-1959 masih terus aktif dalam perpolitikan Indonesia hal tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan NU pada pemilu 1955 dan berhasil menempati posisi tiga besar yang juga menjadikan NU mendapat jatah menteri di pemerintahan.

Setelah keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik, NU berkembang menjadi representasi golongan Islam selama era Demokrasi Terpimpin. Namun, pada masa Orde Baru, peran NU dalam politik nasional menurun akibat kebijakan fusi partai yang diterapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973. Pada tahun 1984, NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926, yang mengarah pada penghentian keterlibatannya dalam politik dan fokus pada pengembangan program-program untuk umat Islam di Indonesia.

2. Sistem Kepartaian Pada Masa Orde Baru

Masa orde baru secara sederhana dapat diartikan sebagai masa peralihan pemerintahan presiden soekarno ke presiden soeharto di tahun 1967. Sistem pemerintahan pada masa orde baru ini menganut sistem demokrasi presidensial yang mana kepala negara dan kepala

pemerintahan dipegang oleh presiden. Pasca peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, Indonesia mengalami perubahan sistem politik menjadi sistem politik demokrasi yang mana sebelumnya menganut sistem politik otoritarian. Perubahan sistem politik berdampak juga pada sistem kepartaian, yaitu adanya jaminan kebebasan dalam pembentukan suatu partai politik (Romli, 2016: 199-200). NU yang pada masa orde lama merupakan partai yang dianggap dekat dengan pemerintahan Soekarno, ketika pergantian masa kepemimpinan Soeharto ruang gerak NU dalam perpolitikan dibatasi oleh rezim Soeharto.

Partai-partai yang sudah ada sejak era orde lama masih tampil di kancah perpolitikan Indonesia. Partai-partai tersebut diantaranya PNI, NU, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, dan Murba. Partai-partai ini berkurang dari era Orde Lama karena pembubaran PKI dan Partindo. Pemerintahan Soeharto menolak keinginan para simpatisan dan mantan anggota Masyumi untuk menghidupkan kembali Masyumi, tetapi diberi izin untuk mendirikan partai baru yang disebut Partai Muslimin Indonesia, yang kemudian disingkat menjadi Parmusi pada tahun 1968. Selanjutnya, pemerintahan Orde Baru menetapkan pemilu pertama akan diadakan pada tahun 1971, yang akan diikuti oleh sembilan partai politik dan

organisasi kekayaan yang dikenal sebagai Golkar (Mohsin, 2018: 781).

Pemilu 1971 menjadi kontestasi pertama Golkar dalam pesta demokrasi Indonesia. Golkar yang merupakan partai pemerintahan Soeharto dianggap berbuat tidak adil selama penyelenggaraan pemilu di era orde baru yang ditunjukkan dengan penyederhanaan partai politik yaitu golongan nasionalis, golongan agama dan ditambah satu golongan karya (Pamungkas, 2009: 116). Hal tersebut disebabkan karena Soeharto mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik di Indonesia yang didasari dengan alasan partai politik mengganggu stabilitas negara. Kebijakan fusi partai tersebut mengakibatkan terbatasnya ruang gerak partai politik, sebab dengan adanya kebijakan tersebut maka partai yang ada di pentas nasional hanya berjumlah tiga partai yang telah dikelompokkan berdasarkan ideologi dasar partai yang ada yaitu nasionalisme, keagamaan, dan pekerjaan serta tambahan dari kelompok karya pembangunan. Pemerintah orde baru menginginkan suasana yang kondusif dalam perpolitikan Indonesia dengan meminimalisir persaingan antar ideologi partai, yang diharapkan dapat fokus ke program pemerintah.

Pemilu tahun 1974 partai politik yang menjadi peserta sebanyak tiga partai yang merupakan hasil fusi kebijakan

Soeharto. Partai-partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Golongan Karya (Golkar). Penggabungan partai tersebut hasil pemilu yang diselenggarakan sejak tahun 1974 hingga 1998 selalu dimenangkan oleh Golkar. Penggabungan partai-partai tersebut memang pada dasarnya untuk membangun hegemoni Golkar sebagai partai pemerintah yang melakukan intervensi ke partai-partai di Indonesia, sedangkan PPP dan PDI hanya dianggap sebagai pelengkap saja (Noer, 1983: 73).

Fusi partai yang dicanangkan oleh Soeharto memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri bagi NU. NU merasa dengan adanya penggabungan tersebut dapat menyatukan seluruh partai yang beraliran Islam dapat menjadi salah satu cara untuk menyatukan umat Islam. Namun, dengan penggabungan tersebut juga dapat menimbulkan konflik antar partai yang melebur menjadi PPP tersebut yang disebabkan oleh perbedaan visi-misi dan tujuan partai-partai lainnya. Hal tersebut bisa saja menjadi bumerang bagi kesatuan umat Islam di Indonesia.

3. Dinamika Partai NU Pasca Pemberlakuan Fusi Partai

a. Menjadi Bagian dari Partai Persatuan Pembangunan

NU yang berfusi dengan partai agama lainnya yang kemudian menjadi

Partai Persatuan Pembangunan, mengikuti gelaran pemilu kedua di era orde baru tepatnya tahun 1977. Penggabungan NU yang menjadi PPP merupakan gabungan gabungan kelompok Islam modernis dan tradisionalis. Kelompok tradisionalis berasal dari NU dan Perti sedangkan modernis berasal dari Parmusi dan PSII, perbedaan tersebut sempat menimbulkan konflik contohnya ketika penentuan logo partai yang disebabkan oleh cara pandang dan ideologi yang berbeda dari setiap partainya.

Menjelang penyelenggaraan pemilu 1977, PPP melaksanakan Musyawarah Nasional pada 1975 yang membahas pembagian jatah kursi di parlemen untuk pemilu 1977 (Aqidah, 2019: 32). Penyelenggaraan Munas tersebut menunjukkan mulai adanya keharmonisan antar golongan partai yang berfusi menjadi partai yang berlogo Ka'bah tersebut. PPP harus mampu beradaptasi dengan kebijakan politik Orde Baru agar tidak terasing dalam parlemen karena mereka adalah partai politik Islam yang terbentuk dari fusi partai Islam sebelumnya pada tahun 1973.

NU beranggapan bahwa jika penggabungan partai dapat merugikan posisi NU sebagai partai politik dan hanya akan menjadi minoritas saja di tubuh PPP, meskipun pada kenyataannya pada gelaran pemilu 1971 NU meraih posisi

kedua perolehan suara pemilu. NU merasa khawatir kejadian di masa lampau ketika NU menjadi bagian dari Masyumi akan terulang kembali, yaitu merasa dikucilkan ketika menjadi anggota dalam tubuh Partai Masyumi (Minan, 2018: 34). NU pada akhirnya mulai menyetujui penggabungan partai tersebut namun dengan syarat bahwa fusi partai tersebut berbentuk sebuah federasi dan setiap partai politik Islam tetap ada dan organisasi pimpinan kerja ini didasarkan pada prinsip-prinsip mayoritas berdasarkan pertimbangan di DPR/DPRD.

Partai Persatuan Pembangunan resmi didirikan pada 5 Januari 1973, setelah mencapai kesepakatan dari perwakilan partai-partai Islam. KH Idham Chalid mewakili NU pada kesepakatan yang diselenggarakan di kediaman Mintaredja yang dikenal dengan nama deklarasi Partai Persatuan Pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, PPP melakukan konsolidasi dengan kelompok-kelompok yang bergabung di tahun 1975. NU yang memperoleh suara terbanyak ketika pemilu 1971 NU dapat menempatkan anggota-anggota di posisi penting dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan, seperti Presiden Partai dan Majelis Syuro Partai, antara lain KH. Idham Chalid (Ketua PBNU) dan KH. Bisri Syansuri (Rois Syuriah PBNU). Sedangkan

pemenang partai Islam kedua, HM. Mintaredja dari Parmusi, memegang jabatan eksekutif (Minan, 2018: 36).

NU yang berfusi dengan partai-partai Islam lainnya kadang kala terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik. Konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan internal partai. Sebagai contoh terjadinya pengurangan kursi di Parlemen yang dilakukan oleh pimpinan partai Djaelani Naro. NU yang seharusnya mendapat kursi lebih banyak di parlemen karena berdasarkan konsensus 1975, yaitu jatah kursi di parlemen berpatokan pada hasil pemilu 1971 dimana NU meraih suara paling banyak di antara partai-partai yang melebur menjadi PPP (Hidayatullah, 2014: 520). Kalangan NU merasa keberatan dengan kebijakan tersebut karena merugikan posisi NU di tubuh PPP. Namun demi tidak menimbulkan konflik internal, NU tidak bertindak berlebihan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Djaelani Naro tersebut.

Dinamika hubungan NU dengan PPP tidak selalu berjalan harmonis. Kedua kelompok yang menjadi kesatuan tersebut dalam beberapa waktu mengalami selisih pendapat. Perselisihan tersebut kerap terjadi karena persaingan antar kelompok pembentuk PPP, termasuk NU yang berasal dari kalangan tradisional dengan Muhammadiyah yang merupakan

kalangan modernis. Kedua kelompok ingin memperkuat pengaruhnya dalam partai dan memperoleh posisi strategis yang paling banyak, terutama lebih banyak kursi di parlemen (Ariffin, 2019: 16). Walaupun NU adalah bagian terbesar dari PPP, Parmusi mampu memimpin partai selama waktu yang cukup lama, membuat NU menjadi kurang berpengaruh. NU memutuskan keluar dari PPP pada tahun 1982 setelah kebijakan yang tidak adil muncul, yang didukung oleh Parmusi. Namun, NU masih memungkinkan anggotanya untuk berpartisipasi secara aktif dalam PPP.

b. Kembali ke Khittah 1926

Khittah dapat didefinisikan sebagai jalan, bagi warga NU *Khittah* dapat dimaknai sebagai kembali ke jalan awal yaitu pernyataan NU sebagai organisasi yang tidak lagi terafiliasi kelompok politik atau partai politik. *Khittah* 1926 NU pertama kali disampaikan oleh KH Achyat Chalimi (Mojokerto) pada tahun 1954 saat Mukhtar NU ke-20 berlangsung di Surabaya. Menurutnya, sudah semestinya NU kembali ke konsep awal pada saat pembentukannya di tahun 1926 yaitu sebagai organisasi sosial keagamaan. Gagasan tersebut kembali muncul ketika pelaksanaan Mukhtar NU ke-27 di Situbondo pada 12 Desember 1984.

Mukhtar tersebut menghasilkan beberapa keputusan salah satunya seruan untuk kembali ke *Khittah* 1926 yang artinya NU tidak berpolitik praktis lagi dan penetapan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 1984-1989. Gus Dur yang terpilih menjadi ketua menjadi pembeda bagi tubuh NU yang merepresentasikan pemimpin muda Islam. Kiai juga mendukung inisiatif pemuda NU karena pada dasarnya kembali ke *khittah* 1926 berarti mengembalikan peran ulama ke posisi yang lebih besar (Shobacha, 2012: 110). Nahdlatul Ulama terlibat dalam pergumulan politik praktis menyebabkan banyak kader-kadernya yang memilih berkarir di bidang politik dan melupakan komitmen utamanya sebagai anggota Nahdlatul Ulama yaitu ulama yang bertugas mengajarkan nilai-nilai keislaman bagi umat Islam.

Khittah 1926 NU pertama kali dicetuskan oleh KH. Achmad Siddiq saat bersamaan ketika penyelenggaraan Mukhtar NU di Situbondo. KH. Achmad Siddiq mencetuskan usulan *Khittah* tersebut berlandaskan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto yaitu mengenai penerapan Pancasila sebagai asas utama bagi seluruh organisasi masyarakat dan organisasi politik yang tentunya berdampak pada NU

yang merupakan organisasi masyarakat Islam dan juga terafiliasi sebagai partai politik (Azra, 1998: 97). NU pada akhirnya menerima kebijakan Soeharto tersebut dan menempatkan Pancasila sebagai asas utama bagi organisasi masyarakat NU.

KH. Achmad Siddiq yang menginisiasi konsep *Khittah* ini bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan antar umat Islam dan juga umat agama lainnya. Konsep persaudaraan ini dikenal sebagai *Ukhuwah Wathaniyah* yang berarti persaudaraan kebangsaan yang merujuk pada sikap toleransi umat beragama di Indonesia agar tidak timbul perpecahan yang salah satunya adalah perbedaan pandangan politik. Sementara untuk konsep persaudaraan kemanusiaan atau *Ukhuwah Basyariyah* merujuk pada sikap saling menolong antar manusia tanpa membedakan suku, ras, maupun agama (Daud, 2021: 36). Harapan dari konsep persaudaraan dari KH. Achmad Siddiq tersebut yaitu agar terciptanya kerukunan antar umat beragama dengan mengesampingkan kepentingan individu maupun kelompok dan golongan tertentu, terlebih lagi ketika adanya kontestasi politik di Indonesia seperti pemilu yang kadang menggunakan agama sebagai alat untuk meraup suara yang dapat menimbulkan perpecahan.

NU meneguhkan jati dirinya, dengan memutuskan untuk kembali ke *Khittah* Nahdlatul Ulama 1926 sebagai langkah berpolitik Nahdlatul Ulama selama era Orde Baru. Untuk menghindari mengganggu pertumbuhan sektor ekonomi, organisasi-organisasi yang memiliki kekuatan massa secara bertahap mengurangi peran politik mereka selama era Orde Baru. Karena kekuatan politik masyarakat akan menimbulkan banyak konflik partai politik, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Fokus utama pembangunan pemerintahan Orde Baru adalah hal itu, yang dianggap sebagai ganjalan dalam proses pembangunan ekonomi yang digagas (Albani, 2021: 147).

Sejak tahun 1984, fokus kegiatan dan agenda NU tidak lagi ke arah ranah politik melainkan lebih condong ke kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar warga negaranya, seperti pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Pada tahun 1984, NU lebih berkonsentrasi pada kegiatan kultural daripada berpolitik praktis (Rakhman, 2021: 11). NU yang sebagaimana awalnya merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan, pasca *Khittah* 1926 ini NU berusaha membangun kembali titik awal pembentukan melalui kegiatan-kegiatannya dengan berusaha ikut

membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat dengan harapan kebermanfaatan masyarakat, kemajuan negara, dan meningkatkan derajat umat. Untuk itu, khittah menunjukkan ulama sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama organisasi.

Kembalinya NU ke *khittah* memunculkan optimisme baru untuk memberdayakan umatnya yang miskin dan bangsa Indonesia yang masih terbelakang dalam banyak hal. Selain menyejahterakan umat, sebagai organisasi sosial keagamaan NU dipandang akan lebih fleksibel karena masyarakat NU bisa tersebar di berbagai partai politik. Posisi sosial keagamaan dianggap bisa membuat NU memayungi masyarakatnya yang beragam. Terdapat tiga pengelompokan di tubuh NU semenjak kembali ke khittah. Pertama, kelompok politisi yang secara langsung atau tidak langsung terjun ke dunia politik. Kedua, kelompok organisator yang tegas menyatakan tidak berafiliasi dengan parpol maupun organisasi politik. Ketiga, kelompok independen atau kelompok bebas yang tidak mengafiliasikan diri dengan partai politik maupun tidak mengabdikan diri sebagai pengurus NU.

KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu partai politik Islam terbesar di Indonesia pada era awal kemerdekaan

hingga pertengahan orde baru. NU pada awal pembentukannya bukanlah partai politik melainkan organisasi sebuah organisasi sosial dan keagamaan. NU mulai aktif di bidang politik ketika menjadi salah satu perintis pembentukan Partai Masyumi pada 7 November 1945. Hubungan NU dan Masyumi hanya bertahan selama 7 tahun saja, sebelum pada akhirnya NU memutuskan untuk melepaskan diri dan mendirikan partai politik sendiri pada 1952.

NU menjadi salah satu partai yang terdampak dari kebijakan tersebut. NU digabungkan dengan partai lain yang sama-sama berideologi Islam yaitu Parmusi, PSII, dan PERTI yang disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). NU yang berfusi dengan partai Islam lainnya tidak selalu memiliki hubungan harmonis dengan partai yang tergabung menjadi PPP tersebut. Partai-partai di PPP sering berselisih pendapat satu sama lain meskipun mereka sebenarnya berasal dari kalangan Islamis, namun karena perbedaan ideologi tiap partainya maka konflik internal tidak dapat dihindarkan.

Tahun 1984 NU memutuskan kembali ke jalan awalnya sebagai organisasi sosial keagamaan atau yang dikenal sebagai Khittah 1926. NU memposisikan politik hanya sebagai instrumen mencapai tujuan kemaslahatan

bangsa dan negara. Oleh karena itu, NU secara struktural menerapkan politik kebangsaan, keumatan, kerakyatan, dan etika, bukannya politik praktis yang berfokus pada kekuasaan dengan menghalalkan semua cara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zahra, N. 2023. *Dinamika Hubungan Partai Masyumi Dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 1952-1960*. (Skripsi). Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Anwar, I. (2020). Tulang Punggung Dipunggungi: Pecah Kongsi Nu-Masyumi Jelang Pemilu 1955. *Al-Qalam*, 26(2), 353-368.
- Aqidah, R. F. (2019). *Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Masa Orde Baru (Studi Historis Pemilu 1977 di Indonesia)*. (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ariffin, M. (2019). Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan di Masa Orde Baru. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*. 5 (1), hlm. 12-22.
- Azra, A. 1998. *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial dan Intelektual*. Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM).
- Bathoro, A. (2018). Redupnya Peran Politik Islam Di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi Oleh Presiden Soekarno). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), hlm. 24-41.
- Chumairoh, Siti (2014) *NU Pada Masa Orde Baru : Studi Tentang Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila*. (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Daud, S. 2021. *Reorientasi Politik NU Pada Masa Orde Baru (Analisis Strategi Politik NU Tahun 1984-1998)*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Fealy, G. 2003. *Ijtihad Politik: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Hafiun, M & Yusrianto, A. 2009. *Dinamika Sejarah NU dan Tantangannya Kini*. Yogyakarta: Tangga Ilmu.
- Hidayatullah, A., & Haidar, M. A. (2014). Depolitisasi Nahdlatul Ulama 1968-1983. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3), hlm. 517-526.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Madinier, R. 2013. *Partai Masjumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Jakarta: Mizan.
- Mahbub, M. 2023. *NU Tulang Punggung Negara*. Yogyakarta: Sultur Pustaka.
- Marijan, K. 1992. *Quo Vadis NU; Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga.
- Miftahudin., Widiyanta, D., Mawardi, H. 2021. *Dinamika Perjuangan Badan Federasi Umat Islam Menuju Kemerdekaan Indonesia, 1937-1945*. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 17(2), hlm. 1-10.
- Minan, Ahmad Khoiron. 2018. *Partai Persatuan Pembangunan pasca kembalinya NU ke khittah 1926 tahun 1984-1994*. (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Muksin, A. 2018. Partai Politik dan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), hlm. 777-788.

- Nikmah, K. 2023. Pergerakan Nahdlatul Ulama (NU) Dari Organisasi Sosial-Keagamaan Ke Organisasi Politik Tahun 1952-1973. *Jusan: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 1(1), hlm. 32-48.
- Noer, D. 1983. *Ideologi, Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Penghidmahan.
- Noer, D. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Utama Grafiti.
- Pamungkas, M., dkk. (2019). *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi 1955*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Pamungkas, S. 2009. *Perihal Pemilu: Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- PBNU. 2022. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama: Keputusan Mukhtar Ke-34 Nahdlatul Ulama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- Rakhman, A. S. (2021). Dinamika Perkembangan Politik Nahdlatul Ulama Pasca Khittah Tahun 1984-1999. *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1 (1). hlm. 8-17.
- Rizqi, R. (2022). Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde baru. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), hlm. 204-211.
- Romli, L. (2016). Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 2(2). hlm. 199-200.
- Samosir, O. (2022). Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia. Jakarta: UKI Press.
- Shobacha, N. (2012). Strategi Politik Nahdlatul Ulama Di Era Orde Baru. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 2(1), hlm. 99-113.